

Musyawarah Desa Untuk Verifikasi dan Validasi DTKS se-Kecamatan Lumbis

Dabulon.simsa.id, Senin (11/11/2024); Dalam Upaya memperkuat ketepatan dan keakuratan data kesejahteraan sosial, Pemerintah Kecamatan Lumbis menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Lumbis, acara ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Lumbis Rutheny, SH, para Kepala Desa se-Kecamatan Lumbis, dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dari seluruh desa di wilayah kecamatan Lumbis. Musdes ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dalam DTKS benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran, dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat dan PSM Rena Kumalasari turut hadir.

Acara dibuka oleh Sekretaris Camat Lumbis, Rutheny, SH, yang menyampaikan pentingnya peran DTKS dalam menyusun kebijakan kesejahteraan sosial di Kecamatan Lumbis. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa verifikasi dan validasi DTKS adalah kunci untuk memastikan bantuan pemerintah sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "DTKS bukan hanya data, tetapi merupakan nyawa dari berbagai program sosial pemerintah. Akurasi data ini menentukan seberapa besar dampak yang dapat kita berikan kepada masyarakat," ujar Camat Lumbis dengan penuh semangat.

Dasar Hukum DTKS

- **Undang-Undang No. 13 Tahun 2011** tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012** tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi pedoman pelaksanaan DTKS secara nasional.
- **Keputusan Sekretaris Daerah Nunukan Nomor 4 Tahun 2024**, yang membentuk Tim Verifikasi dan Validasi DTKS Kabupaten Nunukan, sebagai bentuk komitmen Kabupaten Nunukan untuk menjamin keakuratan data kesejahteraan sosial melalui proses verifikasi dan validasi berkelanjutan.

Paparan Tentang DTKS

Dalam sesi paparan, Sekretaris Camat Lumbis Rutheny, SH secara mendetail menjelaskan terkait DTKS kepada para Kepala Desa dan PSM yang hadir, membahas aspek penting DTKS yang harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan terkait **DTKS**: Beliau menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data nasional yang berfungsi untuk mencatat individu dan keluarga yang membutuhkan bantuan kesejahteraan sosial. “DTKS ini adalah acuan utama untuk berbagai program bantuan, termasuk program bantuan tunai, program sembako, dan subsidi lainnya. Jadi, sangat penting bagi kita untuk memahami siapa saja yang tercatat di dalamnya,” jelas Sekretaris Camat Lumbis.

Tujuan dan Fungsi DTKS

Bahwa DTKS memiliki tujuan utama sebagai acuan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Fungsi dari DTKS adalah untuk menyediakan basis data yang akurat, sehingga pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi bantuan dengan lebih baik. “DTKS ini akan menjadi dasar bagi kita dalam menilai apakah bantuan sudah sampai pada yang berhak dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Manfaat DTKS bagi Masyarakat

Manfaat langsung dari DTKS, yaitu memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan, serta manfaat jangka panjang, yaitu mendorong penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syarat Penduduk yang Masuk DTKS

Bahwa untuk masuk dalam DTKS, penduduk harus memenuhi sejumlah syarat, seperti kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan, kelengkapan administrasi, dan identitas kependudukan yang resmi. Beliau juga mengingatkan agar para Kepala Desa dan PSM berhati-hati dalam menyeleksi penerima untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang terdata.

Alur Verifikasi dan Validasi DTKS:

- **Pengumpulan Data Awal:** Kepala Desa dan PSM mengumpulkan data masyarakat yang membutuhkan melalui pendataan lapangan dan wawancara. Data tersebut mencakup informasi ekonomi, status sosial, dan kondisi kependudukan.
- **Verifikasi dan Kroscek Data:** Tim verifikasi melakukan pemeriksaan awal atas data yang dikumpulkan, mengecek kevalidan dokumen identitas dan kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan.
- **Validasi Lapangan:** PSM melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengecek keakuratan kondisi sosial dan ekonomi yang dilaporkan. Proses ini memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan situasi warga.
- **Pengajuan dan Konsolidasi Data:** Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dikonsolidasikan di tingkat desa dan kecamatan, kemudian diajukan ke dinas sosial untuk ditindaklanjuti.

Penggunaan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation): Aplikasi SIKS-NG, yang digunakan untuk mengelola data kesejahteraan sosial secara digital. Aplikasi ini, yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial, memiliki fitur-fitur yang mendukung proses verifikasi dan validasi DTKS secara lebih efisien.

- **Input Data:** Melalui SIKS-NG, PSM dapat langsung memasukkan data warga yang telah diverifikasi, sehingga mengurangi risiko duplikasi dan kesalahan.
- **Pembaruan Data:** Aplikasi ini memungkinkan pembaruan data secara real-time, sehingga setiap perubahan kondisi sosial ekonomi warga bisa langsung direkam.
- **Pelacakan dan Monitoring:** SIKS-NG dilengkapi dengan fitur monitoring yang memungkinkan pemerintah daerah memantau perkembangan data kesejahteraan sosial, memudahkan koordinasi antara kecamatan dan dinas terkait.

“SIKS-NG membantu kita dalam menjaga integritas data DTKS dan memastikan setiap pembaruan data dilakukan dengan cepat. Sistem ini penting agar kita tidak ketinggalan dalam memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan.”

Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah paparan, sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif. Para Kepala Desa dan PSM menyampaikan kendala yang mereka temui, seperti kesulitan dalam verifikasi data warga yang tinggal di area terpencil atau yang belum memiliki identitas resmi. Menanggapi hal ini, Rutheny, SH mengimbau agar semua pihak bekerja sama dan aktif melakukan sosialisasi kepada warga terkait pentingnya melengkapi identitas kependudukan.

Hasil Musyawarah Desa untuk Verifikasi dan Validasi DTKS

Bagian akhir dari Musyawarah Desa yang dilaksanakan ini Aula Kantor Camat Lumbis menyetujui hasil pendataan Verifikasi dan Validasi DTKS di tingkat desa, sebagai acuan untuk sinkronisasi dengan Data Base DTKS Dinas Sosial Kabupaten Nunukan. Dengan telah tervalidasinya DTKS secara berjenjang akan menghasilkan data yang akurat dengan pengawasan dan pendampingan baik dari tim pendamping Kecamatan Lumbis maupun dari Tim yang di tunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.

Penutup

Musdes ini merupakan langkah strategis dalam memastikan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Lumbis tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Rutheny, SH menutup acara dengan mengingatkan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran verifikasi dan validasi DTKS di seluruh desa.